



Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah di Provinsi Aceh

Muhammad Furqan^{1*}, Safuridar², Puti Andiny³

¹⁻³Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ekonomi Pembangunan Universitas Samudra, Indonesia

Email: furqanlangsa1919@gmail.com¹, safuridar@unsam.ac.id², putiandiny@unsam.ac.id³

*Penulis Korespondensi: furqanlangsa1919@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the influence of road infrastructure, education level, and electricity consumption on regional economic development inequality in Aceh Province. Development inequality remains a major challenge despite Aceh's relatively low Gini Ratio compared to other provinces in Indonesia. Differences in infrastructure quality among districts and municipalities are expected to affect income distribution and community welfare. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics of Aceh Province and the Aceh Regional Development Planning Agency for the 2008–2023 period, covering 23 districts and municipalities. Multiple linear regression analysis with EViews 13 is applied to examine the relationships among variables. The dependent variable is economic development inequality, measured by the Gini Ratio, while the independent variables include road infrastructure, education level, and electricity consumption. The findings are expected to provide valuable policy recommendations for promoting equitable regional development and sustainable economic growth.*

Keywords: *Economic Development Inequality; Education Level; Electricity Consumption; Gini Index; Road Infrastructure.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh infrastruktur jalan, tingkat pendidikan, dan konsumsi listrik terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Aceh. Ketimpangan pembangunan masih menjadi tantangan meskipun nilai Gini Ratio Aceh tergolong rendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Perbedaan kualitas infrastruktur antarkabupaten/kota diduga memengaruhi distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Bappeda Aceh periode 2008–2023 pada 23 kabupaten/kota. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak EViews 13. Variabel dependen adalah ketimpangan pembangunan ekonomi yang diukur menggunakan Gini Ratio, sedangkan variabel independennya meliputi infrastruktur jalan, tingkat pendidikan, dan konsumsi listrik. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran mengenai pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun simultan serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih merata guna mengurangi ketimpangan ekonomi di Provinsi Aceh secara efektif, berkelanjutan, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Gini Ratio; Infrastruktur Jalan; Ketimpangan Pembangunan Ekonomi; Konsumsi Listrik; Tingkat Pendidikan.

1. LATAR BELAKANG

Infrastruktur adalah salah satu mekanisme penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga dianggap sebagai katalisator pembangunan nasional dan regional yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak langsung dan terukur terhadap kualitas hidup masyarakat bukan hanya akumulasi kuantitatif fasilitas.

Peningkatan mutu kehidupan masyarakat sebagai konsekuensi dari pengembangan infrastruktur dapat diukur melalui peningkatan produktivitas dan pola konsumsi individu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dianalisis melalui metrik perkembangan ekonomi di

setiap wilayah, terlepas dari kontribusi spesifik yang diberikan oleh infrastruktur (Ndulu et al., 2005).

Infrastruktur pada hakikatnya berfungsi sebagai pemicu utama aktivitas ekonomi. Demi mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang berlandaskan pada prinsip keuntungan bagi masyarakat miskin, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur memegang peranan krusial. Lebih lanjut, infrastruktur memberikan luaran berganda yang substansial dalam hal pembentukan lapangan kerja serta perluasan kesempatan berkarir. Infrastruktur juga dapat menjadi acuan strategis bagi aparaturnegara dalam merumuskan kebijakan yang relevan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah perlu mengarahkan fokusnya pada peningkatan ekonomi serta pembangunan infrastruktur di tingkat pusat dan daerah, sembari berupaya menekan disparitas ekonomi antarprovinsi di Indonesia (Faradis, 2020).

Infrastruktur memegang peranan krusial dalam eksistensi suatu bangsa dan negara. Dari perspektif ekonomi mikro, suplai fasilitas infrastruktur secara signifikan berdampak pada ongkos produksi. Infrastruktur seringkali dipandang sebagai penggerak utama dalam pembangunan di tingkat nasional maupun regional. Lebih lanjut, peningkatan kualitas kehidupan serta kemakmuran masyarakat, meliputi aspek sosial dan ekonomi, sangat berkorelasi dengan ketersediaan infrastruktur.

Fokus utama dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas serta masalah yang dihadapi di tingkat regional dan nasional adalah masalah ekonomi. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa infrastruktur beroperasi secara optimal guna memaksimalkan manfaat bagi publik. Melalui peningkatan efektivitas dan hasil produktif dari beragam sektor infrastruktur menunjukkan hubungan yang menguntungkan dengan kemajuan ekonomi di suatu wilayah.

Infrastruktur ekonomi yang memadai adalah komponen penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal karena dapat mencegah kemiskinan meningkatkan kualitas hidup mendukung pertumbuhan pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa.

Infrastruktur ekonomi diperlukan oleh sektor bisnis untuk meningkatkan produktivitas, memudahkan distribusi barang dan jasa, dan mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas operasional. Akibatnya infrastruktur ekonomi sangat penting untuk mendorong akumulasi investasi dan menciptakan lingkungan bisnis yang baik. Pembangunan infrastruktur ini memungkinkan masyarakat terpencil termasuk Aceh untuk mengalami kemajuan ekonomi. Ini akan terjadi dalam jangka pendek dengan menciptakan pekerjaan di bidang konstruksi. Namun

dalam jangka menengah dan panjang kontribusi infrastruktur ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di bidang terkait (BAPPEDA ACEH, 2020 PUPR, 2020).

Infrastruktur yang baik seperti jalan dan listrik dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing regional infrastruktur pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur listrik dapat meningkatkan produktivitas bisnis dan industri. Upaya pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi di daerah belum sepenuhnya berhasil seperti yang terlihat di Provinsi Aceh (PUPR, 2020).

Salah satu provinsi Indonesia dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi adalah Aceh. Menurut data BPS ada perbedaan tingkat pendapatan per kapita di antara kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Utara memiliki pendapatan per kapita tertinggi pada tahun 2021 sebesar 73,8 juta sedangkan Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki pendapatan per kapita terendah pada tahun 2021 sebesar 25,2 juta. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah perbedaan dalam pendapatan per kapita (BPS Aceh, 2021).

Selain itu, peningkatan kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan serta antar daerah adalah tanda dari kondisi ini. Hal ini menunjukkan bahwa ada nya korelasi negatif antara pertumbuhan pendapatan per kapita selama periode waktu tersebut dan pertumbuhan pendapatan per kapita. Kesenjangan pendapatan di Provinsi Aceh umumnya rendah. Indeks Gini Ratio Provinsi Aceh juga lebih rendah daripada indeks nasional (BPS Aceh, 2018).

Selain itu, proyek infrastruktur dapat membantu mengurangi disparitas di setiap Provinsi, terutama di Aceh. Jalan, listrik, pendidikan, dan infrastruktur lainnya memiliki efek luar yang menguntungkan yang akan menguntungkan masa depan. Semua fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur meningkatkan produktivitas bahan input selama proses produksi dan distribusi infrastruktur meningkatkan tingkat produktivitas. Infrastruktur yang paling berdampak pada tingkat pembangunan daerah adalah pembangunan jalan, dermaga, listrik, pendidikan, dan rumah sakit.

Peningkatan PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan tentu saja peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tanda-tanda kemajuan sebuah wilayah. Infrastruktur jalan, seperti infrastruktur listrik, kesehatan, dan pendidikan, tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, panjang jalan yang disesuaikan dengan jenis permukaan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2019-2023 yang mencakup 1.781,72 kilometer memiliki kemampuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya wilayah yang memiliki

infrastruktur yang lebih baik seharusnya mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur sangat penting untuk pertumbuhan nasional dan regional.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2023 Masalah fasilitas pendidikan yang disebabkan oleh ekonomi dan peningkatan kesadaran masyarakat atau fasilitas pendidikan Pemerintah Aceh telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah pendidikan di Provinsi Aceh, termasuk membangun kurikulum yang didasarkan pada kompetensi dan kualitas guru. Dengan demikian, diharapkan lulusan yang Pendidikan diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, dan terampil.

Data BPS Aceh 2022 menunjukkan bahwa anak-anak mengalami peningkatan dalam pendidikan yang akan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, peningkatan dalam pendidikan anak-anak akan memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan di setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh. Pengembangan sumber daya manusia mencakup individu yang pekerja keras, kreatif, produktif, serta memiliki keterampilan dan pengetahuan teknologi. Tentu saja, kualitas pendidikan di Provinsi Aceh akan terpengaruh (BPS Aceh, 2022).

Tingkat konsumsi listrik kabupaten/kota Provinsi Aceh pada tahun 2023 adalah 96,94% lebih tinggi dari rasio elektrifikasi nasional sebesar 93,08%. Saat ini, sistem interkoneksi 150 kV Sumatera Utara-Aceh menghasilkan 601 MW daya di NAD, dan sistem isolasi Aceh mengirimkan tegangan 20 kV ke Meulaboh di wilayah pantai timur Aceh.

Bappeda Aceh melaporkan bahwa tingkat konsumsi listrik Provinsi Aceh adalah rendah, dengan 400,60 kilowatt-hour, hampir sama dengan rata-rata nasional 787,60 kilowatt-hour. Untuk menentukan defisiensi infrastruktur kelistrikan, PDB per kapita dan tingkat konsumsi listrik dikaitkan. Konsumsi yang lebih tinggi akan dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan per kapita. Aceh jauh di bawah provinsi lain dalam hal pendapatan per kapita.

Jumlah perhitungan konsumsi listrik kabupaten/kota dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa distribusi konsumsi listrik di Provinsi Aceh berada dalam kategori "Rendah" secara keseluruhan, dengan tingkat konsumsi 400,60 KWh lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 1.285 KWh seperti yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi pengurangan penggunaan energi listrik dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Kedua, ada hubungan kausalitas satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi akan mendorong konsumsi energi. Selain itu keberhasilan pembangunan suatu negara sangat dipengaruhi oleh ketersediaan energi

yang baik, sehingga upaya untuk mengurangi konsumsi energi tidak akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi (BPS Aceh, 2023BAPPEDA ACEH, 2021).

2. KAJIAN TEORITIS

Ketimpangan

Ketimpangan dalam pembangunan ekonomi Indonesia saat ini dan hubungannya dengan belanja pemerintah. Pengkajian ini dilakukan saat ini karena upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketimpangan melalui pemerataan pembangunan melalui alokasi sumber daya fiskal. Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai langkah evaluasi bagi kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan antar wilayah. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyediakan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Investasi baru lapangan kerja baru peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari aktivitas ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal (Hulu & Wahyuni, 2021).

Karena negara-negara berkembang menggambarkan perbedaan kemakmuran ekonomi antara "Ketimpangan distribusi pendapatan" juga dapat digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara orang kaya dan miskin (Baldwin, 1986) Ini terjadi di negara berkembang di mana ada efek sebar yang lemah dan efek balik yang kuat. Disebabkan oleh berbagai macam sumber daya alam dan faktor geografis ekonomi sering mengalami ketimpangan atau disparitas. Karena perbedaan ini setiap daerah memiliki potensi yang berbeda untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Kota & Provinsi, 2017).

Ketimpangan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah ini menyebabkan kecemburuan masyarakat terutama mereka yang berasal dari daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah yang dapat mengganggu stabilitas wilayah. Ada kemungkinan bahwa ada perbedaan pendapatan antar daerah karena kondisi daerah yang berbeda, termasuk perbedaan faktor endowment. Perbedaan pendapatan antar daerah terus meningkat besar ketika perbedaan pendapatan perkapita antar daerah semakin besar. Fokus kegiatan ekonomi, mobilitas barang (perdagangan), faktor produksi, dan investasi publik dan swasta lintas daerah adalah beberapa faktor yang memengaruhi perbedaan pendapatan antar daerah (Hamdani, 2016).

Di negara-negara berkembang ketidakmerataan pendapatan disebabkan oleh faktor-faktor berikut: 1) Pertumbuhan populasi yang lebih besar yang mengakibatkan penurunan pendapatan per orang 2) Kenaikan harga dan 3) Penanaman modal yang signifikan dalam proyek yang membutuhkan banyak dana yang mengakibatkan peningkatan proporsi

pendapatan dari modal karena akumulasi kekayaan. Pengangguran meningkat dibandingkan dengan persentase pendapatan pekerja penurunan mobilitas sosial dan penurunan persentase pendapatan pekerja. (Hady, 2021).

Penyebab ketimpangan di karena keterbatasan ruang gerak fiskal APBN, belanja pemerintah saat ini termasuk belanja rutin yang tidak dapat ditinggalkan atau bersifat mengikat (mandatory spending) termasuk belanja pegawai transfer ke daerah, pembayaran utang hingga kewajiban dan alokasi 20% untuk pendidikan dan 5% untuk pendidikan. Perubahan kualitas sumber daya manusia menyebabkan kemiskinan. Proses produksi yang tidak efisien akan disebabkan oleh kekurangan sumber daya manusia serta kekurangan pengetahuan dan pendidikan. Ketiga perbedaan dalam pendekatan modal berkontribusi pada kemiskinan. Akibatnya untuk memerangi kemiskinan pemerintah secara khusus harus membuat kebijakan yang dapat diterapkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. (Murtala, 2022).

Selain perbedaan yang signifikan dalam kondisi demografis, produksi dan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan perbedaan jumlah sumber daya alam ini akan meningkat. Faktor lokal seperti demografi, kondisi ketenagakerjaan, tingkah laku, kebiasaan, dan etos kerja Mobilitas barang dan jasa yang tidak lancar juga dapat menyebabkan perbedaan ekonomi regional. Jika banyak bisnis terkonsentrasi di daerah tertentu, pasti ada perbedaan (BPS Aceh, 2024).

Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai, suatu sektor akan menjadi lebih produktif yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi dan perubahan upah dan gaji akan mengikutinya. kedua hal tersebut memengaruhi penawaran dan harga barang kebutuhan pokok, dan dengan peningkatan kualitas hidup, kemiskinan dapat berkurang. Seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mendorong pengurangan ketimpangan di suatu wilayah (Radiansyah, 2012).

Pembangunan infrastruktur dapat membantu aktivitas ekonomi. Jika pembangunan infrastruktur dilakukan di daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat daerah tersebut akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki kemampuan untuk maju dan berkembang mengikuti daerah lain yang telah berkembang dan maju sebelumnya sehingga mengurangi ketidaksamaan di daerah tersebut (Mashar, 2022).

Untuk memfasilitasi penyajian perkembangan keuangan di berbagai negara, infrastruktur ekonomi sangat penting. Infrastruktur ekonomi mencakup utilitas umum seperti listrik, komunikasi, media, air bersih, dan pembersihan saluran pembuangan; pekerjaan umum

seperti jalan, bendungan, dan saluran air dan drainase dan proyek transportasi seperti kereta api, angkutan kota, sungai, dan bandara. Sebaliknya infrastruktur sosial termasuk sekolah dan perawatan kesehatan (Imilda et al., 2022).

Keterkaitan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan

Hubungan antara perbedaan ekonomi dan infrastruktur antara provinsi selama periode tersebut. Oleh karena itu, bagian ini secara khusus memeriksa perubahan dalam ketimpangan infrastruktur antara provinsi Indonesia, yang mencakup panjang jalan, jumlah pelanggan, jumlah air bersih, dan luas irigasi (Sukwika, 2018).

Pembangunan infrastruktur adalah bagian penting dari proses pembangunan nasional karena infrastruktur memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian secara strategis. Untuk kemajuan ekonomi suatu negara, infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi sangat penting. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur akan menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ada hubungan antara keberadaan infrastruktur dan tingkat perkembangan sebuah wilayah seperti pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Widodo et al., 2023).

Infrastruktur memiliki peran strategis dan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam proses mengurangi kemiskinan, infrastruktur seperti jalan raya, lalu lintas, kesehatan, komunikasi, dan listrik sangat penting karena merupakan bagian penting dari pembangunan sebuah negara dan berkorelasi langsung dengan pertumbuhan ekonominya.

Infrastruktur seperti jalan raya, listrik, jaringan komunikasi, dan air bersih diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Infrastruktur seperti jalan, dermaga, listrik, pendidikan, rumah sakit, air bersih, dan sanitasi sangat berkaitan dengan tingkat pembangunan daerah. Peningkatan PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan tentu saja dampak pada kesejahteraan masyarakat adalah tanda-tanda pembangunan sebuah negara. (Ilmiah et al., 2018).

Hipotesis Penelitian

Infrastruktur jalan, tingkat pendidikan, dan konsumsi listrik adalah beberapa faktor yang memengaruhi ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Tingkat pendidikan, infrastruktur jalan, dan konsumsi listrik semuanya berkontribusi pada ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data deskriptif kuantitatif yang mencakup 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari tahun 2008 hingga 2023. Data seri waktu, atau data antar waktu dianalisis melalui analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi linier berganda digunakan dalam program Eviews 13 yang merupakan lihat ekonomi:

$$Gr = a + b_1 Ija + b_2 Tpi + b_3 Kli + e \quad (i)$$

Dimana:

Gr = Gini Ratio (Variabel Terikat)

a = Konstanta

Ija = Infrastruktur Jalan (Variabel bebas/X1).

Tpi = Tingkat Pendidikan (Variabel bebas/X2).

Kli = Konsumsi Listrik (Variabel bebas/X3).

e = Error

b1, b2, b3 = Koefisien Regresi

Selanjutnya model umum sebelumnya akan diubah menjadi model khusus studi ini, yang dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e \quad (ii)$$

Yang manan :

Y : Gini Rasio

X₁: Infrastruktur Jalan

X₂: Tingkat Pendidikan

X₃: Konsumsi Listrik

a : koefisien konstanta

b (1,2,3,...) : Nilai koefisien regresi

e: Error

Uji Parsial (Uji t)

Infrastruktur Jalan: Dengan t-statistik sebesar 2.2802 dan nilai probabilitas yang signifikan yaitu 0.0435 yang menunjukkan angka di bawah 0.05 dapat disimpulkan bahwa Jalan Infrastruktur memiliki pengaruh yang besar terhadap ketidakmerataan dalam pembangunan. Tingkat Pendidikan: Bisa disimpulkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh besar terhadap ketimpangan dalam pembangunan. Kesimpulan ini didasarkan pada nilai t-statistik yang menunjukkan angka -1.4495 dan nilai probabilitas yang signifikan adalah 0.1751 yang berarti lebih dari 0.05.

Konsumsi Listrik: Tingkat ketidakmerataan dalam pembangunan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh penggunaan energi. Hal ini terlihat dari t-statistik yang bernilai -1.9909 dan nilai probabilitas (signifikan) sebesar 0.0719 yang menunjukkan angka tersebut lebih besar dari 0.05.

Uji Simultan (Uji F)

Untuk menilai pengaruh yang signifikan dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji simultan. Ini dilakukan dengan membandingkan nilai Prob Statistik (F) di eviews dengan tingkat signifikansi 0.05. Nilai-nilai ini harus memenuhi kriteria berikut:

a) Jika nilai Prob(F-statistic) kurang dari 0.05 maka variabel independen memiliki pengaruh signifikan pada variabel dependen secara bersamaan.

b) Jika nilai Prob(F-statistic) lebih dari 0.05 maka kedua variabel tidak saling mempengaruhi secara signifikan. Hasil uji F (simultan) menunjukkan adanya pengaruh bersamaan antara Infrastruktur Jalan, Tingkat Pendidikan, dan Konsumsi Listrik terhadap Tingkat Ketimpangan Pembangunan dari tahun 2008 hingga 2023.

Uji koefisien determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa efektif model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Skor (R^2) berada di antara nol dan satu, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa variabel independen telah menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan pada variabel dependen. Nilai (R^2) pun berkisar dari nol hingga satu, dengan nilai tinggi menunjukkan bahwa variabel independen memberikan semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan pada variabel dependen. Hasil dari pengujian ini digunakan untuk mengembangkan model yang menilai pengaruh infrastruktur terhadap ketidakmerataan pembangunan ekonomi di provinsi Aceh. Nilai lampiran (R^2) tercatat sebesar 0,546981. Ini berarti bahwa variabel independen yang ada dalam model dapat menjelaskan pengaruh sebesar 54,69% sementara variabel independen yang tidak termasuk dalam model bertanggung jawab atas pengaruh sisanya yaitu 45,31%.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengolahan Data

Hasil Uji Analisis Regresi

Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (gini ratio), yang meliputi pendidikan, penggunaan listrik, dan infrastruktur jalan, digunakan analisis regresi. Tabel berikut menunjukkan hasilnya.

Tabel 1. Hasil uji regresi berganda.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.418123	0.079016	5.291600	0.0003
JALAN	0.130295	0.057140	2.280269	0.0435
PENDIDIKAN	-0.013995	0.009655	-1.449506	0.1751
LISTRIK	-0.002043	0.001026	-1.990982	0.0719
Adjusted R-squared	0.423430	S.D. dependent var		0.013158
Prob(F-statistic)	0.028428			

Sumber: Hasil Olahan Eviews 13

Hasil analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = 0.4181 + 0.1302 X_1 - 0.0139 X_2 - 0.0020 X_3 \quad (\text{iii})$$

Persamaan regresi sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tingkat ketimpangan pembangunan adalah 0,4181 jika nilai Infrastruktur Jalan, Tingkat Pendidikan, dan Konsumsi Listrik tetap sama. Ini ditunjukkan oleh konstanta 0,4181.
- Koefisien variabel infrastruktur jalan 0.1302, tingkat ketimpangan pembangunan akan meningkat sebesar 0.1302 persen jika variabel infrastruktur jalan meningkat sebesar 1%. Ini adalah peningkatan yang signifikan dan positif terhadap tingkat ketimpangan pembangunan.
- Koefisien variabel tingkat pendidikan adalah -0.0139, yang berarti bahwa jika variabel tingkat pendidikan turun 1%, tingkat ketimpangan pembangunan akan turun sebesar -0.0139, yang berdampak kecil dan negatif pada tingkat ketimpangan pembangunan.
- Koefisien variabel konsumsi listrik -0.0020 menunjukkan bahwa jika variabel tersebut mengalami penurunan konsumsi listrik sebesar 1%, tingkat ketimpangan pembangunan akan turun sebesar -0.0020 persen, yang berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan.

Pembahasan

Disparitas Antar Wilayah Aceh

Pengaruh Infrastruktur Jalan Pada Tingkat Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Aceh

Berdasarkan temuan penelitian ini komponen Infrastruktur Jalan menunjukkan dampak yang positif dan berarti terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh. Ketika melihat pengaruh Infrastruktur Jalan, nilainya yang signifikan dibandingkan dengan tingkat ketimpangan pembangunan adalah 0,1302. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel Infrastruktur Jalan berkontribusi positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan yang ada saat ini di Provinsi Aceh dengan nilai $-0,0435 < \alpha = 0,05$. Ada penurunan signifikan

pada ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh sebesar 0,1302 ketika infrastruktur jalan meningkat sebesar 1%. Ini menunjukkan bahwa aspek infrastruktur jalan memiliki pengaruh penting terhadap tingkat ketimpangan sebesar 0,13,02%.

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Aceh

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif terhadap ketimpangan di Provinsi Aceh. Ketika terjadi kenaikan 1% dalam tingkat pendidikan, ketimpangan di daerah tersebut meningkat secara signifikan sebesar -0.0139. Ini menegaskan bahwa pendidikan memiliki dampak yang negatif dan tidak signifikan pada ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan.

Pengaruh Konsumsi Listrik Terhadap Tingkat Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Aceh

Hasil dari penelitian hipotesis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan penggunaan listrik berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh. Dengan memperoleh nilai signifikan pada prob. 0.0719 yang lebih besar daripada $\alpha = 0,05$, kita bisa menyimpulkan bahwa faktor-faktor terkait penggunaan listrik tidak signifikan dan memberikan dampak negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh. Jika konsumsi listrik meningkat sebesar 1%, maka ketimpangan dalam pembangunan ekonomi di provinsi Aceh akan meningkat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana infrastruktur memengaruhi ketidakmerataan dalam perkembangan ekonomi di Provinsi Aceh selama periode 2008 hingga 2023. Dari pengujian dan analisis yang dilakukan, beberapa simpulan telah dirumuskan. Hasil dari pengujian koefisien untuk variabel infrastruktur jalan menunjukkan bahwa di Provinsi Aceh, ketimpangan pembangunan telah mengalami peningkatan yang signifikan secara parsial. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak berlaku jika t-tabel menunjukkan nilai kepercayaan 5% (0,05) atau nilai signifikan di bawah 0,05. Hasil dari pengujian koefisien untuk variabel pendidikan menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh memiliki pengaruh negatif namun hal ini hanya secara parsial. Oleh karena itu hipotesis akan ditolak jika nilai t-hitung lebih besar dibandingkan t-tabel dan nilai signifikansi berada di bawah 0,05 atau 5%.

Pengujian koefisien variabel untuk tingkat ketimpangan pembangunan dan konsumsi listrik di Provinsi Aceh menunjukkan hasil yang negatif dan tidak signifikan secara parsial. Oleh karena itu, hipotesis tersebut berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima jika t -hitung lebih besar dibandingkan t -tabel dengan tingkat kepercayaan 5% (0,05) atau nilai signifikan lebih dari 0,05. Hasil pengujian yang dilakukan sekaligus menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh infrastruktur jalan, penggunaan listrik, dan pendidikan.

Saran

Berdasarkan analisis dari penelitian ini berikut adalah langkah-langkah yang direkomendasikan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di provinsi Aceh. Pemerintah Provinsi Aceh akan meningkatkan infrastruktur jalan, pendidikan, dan penggunaan listrik sebagai langkah awal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Pemerintah Provinsi Aceh berharap dapat meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi di semua kabupaten dan kota. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel tambahan untuk meningkatkan keberhasilan penelitian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pengaruh infrastruktur dan ketimpangan terhadap Provinsi Aceh dapat dikurangi.

DAFTAR REFERENSI

- BAPPEDA ACEH. (2021). Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 12(1), 1–6. <https://ojsbappeda.acehprov.go.id/ojs2/index.php/a>
- BPS Aceh. (2018). BPS Aceh dalam angka indeks gini.
- BPS Aceh. (2021). BPS Aceh dalam angka.
- BPS Aceh. (2022). BPS Aceh dalam angka pendidikan.
- BPS Aceh. (2023). BPS Aceh dalam angka listrik.
- BPS Aceh. (2024). BPS Aceh dalam angka.
- Faradis, R. (2020). Indeks Komposit Pembangunan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 20(1), 33–55. <https://doi.org/10.21002/jepi.2020.03>
- Hady. (2021). Jurnal Riset Ilmu Ekonomi. 1(1), 31–39.
- Hamdani, M. (2016). Semnas fekon 2016. Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perspektif Agency Theory, 2000, 50–57.
- Hulu, P. K., & Wahyuni, K. T. (2021). Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2010-2019. Seminar Nasional Official Statistics, 2021(1), 603–612. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.979>

- Ilmiah, J., Jim, M., Di, E., & Aceh, P. (2018). Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, email: 3(2), 248–255.
- Imilda, Sufyan, & Hajriyanti, R. (2022). Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus: Provinsi Aceh). *Jurnal EMT KITA*, 6(2), 221–226. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i2.614>
- Kota, K., & Provinsi, D. I. (2017). Fajri Hadi INDIKATOR PENYEBAB. III(1), 72–82.
- Mashar, S. F. dan R. (2022). Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi (Studi Kasus: Provinsi Aceh). *Jurnal EMT KITA*, 6(2), 221–226. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i2.614>
- Murtala, M. (2022). Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Dan Dan Kemiskinan Di Provinsi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(2), 125–138.
- Ndulu, B., Kritzinger-van, N., & Reinikka. (2005). Infrastructure, Regional Integration and Growth in Sub-Saharan Africa. *The National, Regional and International Challenges Fondad*, 101–121.
- Radiansyah. (2012). Analisis kontribusi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>